

## UPAYA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK (STUDI PENANGANAN INFORMASI PADA MEDIA ELEKTRONIK)

Dina Syafitri<sup>1</sup>, Aldri Frinaldi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, 25132

<sup>2</sup>Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, 25132

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 10 Mei 2019

Direvisi: 11 Mei 2019

Diterbitkan: 13 Mei 2019

### KATA KUNCI

*Upaya, Penanganan Informasi,  
Kepercayaan Publik*

### KORESPONDEN

No. Telepon: +62 81292106090

E-mail: [syadina0@gmail.com](mailto:syadina0@gmail.com)

### A B S T R A K

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memperoleh gambaran upaya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam membangun kepercayaan publik dengan melakukan penanganan informasi pada media elektronik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik *Porpositive sampling* dalam penentuan informan. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Kasubbag Hubungan Masyarakat & Tata Usaha Kantor Perwakilan dan 3 Staff Hubungan Masyarakat & Tata Usaha Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik *member check* diakhir wawancara dan analisis data diperoleh dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam penanganan informasi pada media elektronik dengan mengacu kepada 7 unsur tahapan-tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan Informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, penggunaan informasi, dan penilaian kritis dan umpan balik sudah terlaksana dan harapannya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat tetap bisa mempertahankan performa dalam penanganan informasi melalui saluran *website* dan Pusat Informasi Komunikasi yang sudah baik, disarankan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat untuk menambah saluran komunikasi media sosial sendiri seperti *instagram*, *facebook*, *twitter* dan *youtube* agar lebih menjangkau masyarakat dalam memberikan informasi terbaru pada zaman saat ini yang serba elektronik.

## PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPK RI membutuhkan peran serta masyarakat dalam memperkuat fungsi BPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Masyarakat sebagai auditor lapangan dapat melapor pada BPK jika menemukan adanya kejanggalan dalam proses pengelolaan lembaga negara. Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu dan memperkuat fungsi BPK agar BPK sebagai lembaga yang mempunyai Integritas, Independen, dan Profesionalisme yang sesuai dengan visi dan misinya tercapai (Wawancara dengan ibuk Rita Rianti S.E.,M.Si,Ak. Kasubbag Humas & TU Kalan BPK RI Perwakilan Sumbar, 18 Januari 2019)

Hal ini pun senada dengan yang terdapat pada buku panduan populer “Mengenal lebih dekat BPK” yang dapat di download pada website resmi Badan Pemeriksa Keuangan. Upaya membangun Indonesia memerlukan keterlibatan semua lapisan masyarakat. Dengan kaitan itulah, masyarakat perlu memiliki pemahaman cukup untuk mengenal segenap lembaga yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menegakkan pemerintah yang bersih. Didalam buku tersebut juga disebutkan bahwa dengan buku tersebut masyarakat akan tergerak untuk mendukung dan terlibat dalam upaya Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan kewajibannya.

Menjalin hubungan yang baik antara BPK RI dengan stakeholders khususnya dan publik (masyarakat) pada umumnya. Oleh karena itu perlu adanya Subbagian Hubungan Masyarakat(Humas) & Tata Usaha Kantor Perwakilan (TU Kalan) BPK RI yang akan berperan sebagai jembatan antara BPK RI dengan masyarakat. Humas & TU Kalan BPK RI harus dapat dengan sigap menyerap informasi yang berhubungan dengan BPK RI serta menganalisa berita tersebut. Semua pegawai BPK RI mempunyai tugas menjaga citra BPK RI yang sudah terbentuk di publik sebagai lembaga negara yang kredibel dan terpercaya.

Tidak mudah untuk menjalin hubungan tersebut, sehingga komunikasi yang intens dengan para pihak akan dapat mengatasinya. Sehingga diperlukan peran komunikasi yang dapat menjaga citra BPK RI di mata publik. Berita tentang BPK RI di media, baik cetak maupun elektronik banyak ditemukan beraneka ragam, mulai dari positif, netral dan negatif. Yang termasuk kedalam pemberitaan positif, apabila isi berita menunjukkan kredibilitas BPK RI, peran BPK RI, dukungan terhadap BPK RI, harapan terhadap BPK RI untuk melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan BPK RI, acara BPK RI (sosialisasi, peresmian, MoU dan acara seremonial lainnya). Pemberitaan netral, apabila isi berita tidak menunjukkan dukungan maupun menyudutkan BPK RI, tidak menjelaskan tugas, fungsi dan peran BPK RI. Pemberitaan negatif, apabila isi berita dimaknai publik meragukan kredibilitas BPK RI, menunjukkan adanya kesalahan dalam LHP BPK RI, kritik terhadap BPK RI, menyudutkan BPK RI, serta menunjukkan adanya konflik dalam BPK RI.

Pemberitaan negatif misalnya yang beredar pada surat kabar Harian Haluan Online Rabu, 09 Mei 2018 Yusafni membantah kalau kerugian negara sampai Rp 62,5 miliar. Pengakuannya, jumlah uang tersebut hanya sekitar Rp 18 miliar “Kalau boleh saya meminta BPK untuk menghitung lagi. Saya juga tidak mengerti bagaimana metode penghitungan oleh BPK sehingga hasilnya sebesar itu,”kata Yusafni saat di Pengadilan Tinda Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Jumat (27/4/2018).

Selain itu, pemberitaan negatif lainnya juga ditemukan pada surat kabar Harian Haluan Online Rabu, tanggal 12 Juli 2017 dengan berita Gubernur Sumatera Barat “Irwan Prayitno” mengeluhkan pola pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan sistem *sampling* untuk setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), menurut Irwan

Prayitno dalam metode *sampling* ini tidak seluruhnya dapat di periksa. Ada yang empat tahun korupsi terjadi baru ketahuan di tahun ke-4 dia bekerja. Irwan Prayitno mengatakan ini contoh pemeriksaan populasi tidak perlu *sampling*, Irwan mengharapkan BPK melakukan pemeriksaan secara Populasi / non *sampling* walaupun dengan cara ini sulit dilakukan karena membutuhkan tenaga pemeriksa yang luar biasa banyak. Dengan munculnya berita negatif di media massa tentang BPK RI dapat menimbulkan *mispersepsi* oleh publik kepada BPK RI.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis peneltiandeskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang diselidiki dan diamati. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang, yaitu pada Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Penggunaan ini dimaksud untuk mengambil sejumlah orang yang dipilih oleh peneliti menurut kriteria yang dimiliki oleh orang tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan, Kasubbag Humas dan TU Kalan BPK RI Perwakilan, dan Staff Humas dan TU Kalan BPK RI Perwakilan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan menggunakan teknik *member check* yaitu data yang diperoleh dikonfirmasi kembali kepada responden untuk melihat mana data yang disepakati dan mana yang ditolak, kemudian diminta untuk menandatangani sebagai bukti melakukan *member check* Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tahapan-tahapan Penanganan Informasi yang Dilakukan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat terhadap Berita yang Muncul Pada Media Elektronik**

Setelah dilakukan penelitian tentang upaya Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumbar dalam membangun kepercayaan publik (studi penanganan informasi pada media elektronik), hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanganan informasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumbar dengan mengacu kepada 7 indikator tahapan-tahapan penanganan informasi yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2008) yaitu meliputi penciptaan informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, penggunaan informasi, dan penilaian kritis dan umpan balik, dengan uraian sebagai berikut:

#### **1) Penciptaan Informasi**

Menciptakan informasi tidak terlepas dari identifikasi dan penggalan sumber-sumber informasi yang tepat menurut Sondang P. Siagian (2008). Dari hasil penelitian dalam penciptaan informasi dengan mengidentifikasi dan penganggalan sumber-sumber informasi, BPK RI Perwakilan Sumbar sudah melakukan identifikasi dan penggalan sumber-sumber informasi yaitu dengan berlangganan koran dengan media-media dan melibatkan media elektronik online seperti *Whatsapp*, *Telepon*, dan *Website* untuk mendapatkan sebuah informasi. Setelah menerima informasi Badan Pemeriksa Keuangan melihat berita tersebut dengan mengidentifikasi judulnya, lihat isi kontennya, fakta-fakta informasinya, dan kemudian cek situsnya, apabila perlu untuk ditindak lanjuti Hubungan

Masyarakat (Humas) BPK mendiskusikan terlebih dahulu kepada Kepala Perwakilan dan Kepala Sekretariat untuk memutuskan tindakan apa yang tepat untuk dilakukan.

## 2) Pemeliharaan Saluran Informasi

Menurut Sondang P. Siagian (2008), Perkembangan pesat dalam informasi ialah terjadinya perkawinan antara teknologi komunikasi dan teknologi informasi, akibatnya makin banyaknya saluran penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain yang disebut saluran informasi multimedia. Baik secara *internal* maupun *eksternal*, saluran tersebut dapat berupa saluran melalui komunikasi lisan, saluran dengan menggunakan tulisan, komputer pada satuan-satuan kerja dalam organisasi yang *online* dengan komputer utama, saluran telepon, *e-mail*, dll. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terlihat bahwa BPK RI Perwakilan Sumatera Barat diberikan kewenangan melalui Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang secara lisan dan tulisan dan *Website* “padang bpk.go.id” sebagai saluran informasi, dan sementara saluran media sosial seperti *instagram*, *twitter*, dan *youtube* hanya BPK RI Pusat. Jadi saluran informasi yang BPK RI Perwakilan sumbar maksimal gunakan yaitu Pusat Informasi Komunikasi (PIK) dan *Website*, yang mana saluran tersebut berjalan dengan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pusat Informasi Komunikasi (PIK) seperti melakukan sistem piket untuk melayani masyarakat secara tatap muka, dan *Website* dengan pemeliharaan secara *hardware* yang menjadi tanggung jawab Kasubbag Umun dan Teknologi Informasi (TI) serta secara *software* di serahkan kepada tim publikasi. Dari hasil penelitian terlihat bahwa BPK RI Perwakilan Sumbar menggunakan *Website* dan Pusat Informasi dan Komunikasi sebagai saluran informasi dan aktif memeliharanya, namun BPK RI Perwakilan Sumbar disarankan menambah saluran informasi media sosial yang dikelola sendiri untuk lebih menjangkau masyarakat dalam memberikan informasi pada zaman saat ini.

## 3) Transmisi Informasi

Menurut Sondang P. Siagian (2008) mengatakan informasi yang dimiliki organisasi perlu diseleksi, mengetahui informasi apa yang dikirim dan kepada siapa dan untuk kepentingan apa menjadi sangat penting. Pentingnya kemampuan memilih dan menggunakan sarana transmisi informasi yang tepat perlu dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terlihat bahwa BPK RI Perwakilan Sumbar sudah melakukan transmisi informasi dalam memilih dan menyeleksi informasi dengan cara menelaah terlebih dahulu informasi dengan melihat sumber dan kebenaran informasi yang muncul terhadap BPK sebelum ditindak lanjuti.

## 4) Penerimaan Informasi

Sesuai dengan pendapat Sondang P. Siagian (2008) penerimaan Informasi perlu memiliki kemampuan untuk melakukan seleksi agar hanya informasi yang relevan dengan misi, fungsi, dan tugas yang diambil. Dari hasil penelitian terlihat penerimaan informasi yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat ketika berita masuk dan diterima, pimpinan mencermati dan memutuskan informasi tersebut perlu untuk ditindak lanjuti atau tidak, dan siapa yang berkompeten untuk menjawab, dan dengan menggunakan komunikasi seperti apa seperti dengan melakukan *coffee morning*, hak jawab, siaran pers yang mana semua kegiatan di publikasikan ke dalam *website* BPK RI Perwakilan Sumatera Barat dan kemudian dilakukan dengan klarifikasi duplikasi yang mana bukan satu media yang menjawab tetapi kesemua media dijawab dengan tujuan agar lebih banyak media yang menerbitkan beritanya.

### **5) Penyimpanan dan Penelusuran Informasi**

Menurut pendapat Sondang P. Siagian (2008) bahwa kegiatan penyimpanan informasi sangat penting karena pengalaman menunjukkan bahwa tidak semua informasi yang dimiliki digunakan segera. Oleh karena itu informasi yang telah diolah dengan mengeluarkan biaya tertentu jangan sampai hilang atau tidak bisa ditelusuri apabila diperlukan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa BPK RI Perwakilan Sumbar dalam penyimpanan informasi sudah dilakukan di *website* berupa klipng-klipng yang tersimpan secara otomatis, dan penyimpanan semua informasi berupa dokumentasi dan klipng pada perpustakaan BPK yang secara *hardcopy* dan *softcopy*.

### **6) Penggunaan Informasi**

Sesuai dengan pendapat Sondang P. Siagian (2008) bahwa informasi pada saat ini sudah menyentuh seluruh kehidupan, baik pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi yang digunakan untuk keperluan masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pengguna informasi BPK RI Perwakilan Sumbar meliputi Pengguna utama seperti DPRD/Legislatif yang menggunakannya sebagai pengawasan pada pemerintahan, Pengguna langsung seperti Pemerintah Daerah (PEMDA), Aparat Penegak Hukum (APH) yang menggunakan informasi BPK untuk perbaikan kinerja, dan Pengguna tidak langsung yang membutuhkan informasi dan yang meminta informasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK seperti Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Wartawan.

### **7) Penilaian Kritis dan Umpan Balik**

Penilaian kritis dan umpan balik informasi BPK dianalisis dan ditentukan oleh tim PPID yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam manajemen isu dengan melakukan klarifikasi dan tanggapan berita pada BPK. Sedangkan dalam pelaksanaan sebelum diberikan kepada PPID pegawai Hubungan Masyarakat (Humas) dan Tata Usaha Kantor Perwakilan (TU Kalan) BPK RI Perwakilan Sumbar membaca terlebih dahulu keseluruhan berita, di cek kebenarannya kepada tim PPID dan setelah diputuskan oleh tim PPID, maka pegawai Hubungan Masyarakat (Humas) dan Tata Usaha Kantor Perwakilan (TU Kalan) menyiapkan jawaban untuk diklarifikasi ke media. Hal ini sesuai dengan pendapat Sondang P. Siagian (2008) bahwa kegiatan penilaian kritis sangat diperlukan yang mana hasil penilaian kritis yang dilakukan harus diumpan balikkan yang bermanfaat bagi pimpinan organisasi dan berbagai pihak lain yang memerlukan. Dengan demikian bentuk penilaian kritis juga menunjukkan kinerja instansi tertentu yang berkaitan dengan penanganan informasi dari sudut pandang masyarakat atau penilai instansi tersebut (Aldri Frinaldi, 2017).

### **Upaya BPK RI Perwakilan Sumatera Barat dalam Penanganan Informasi Berita Negatif yang Muncul Di Media Elektronik yang Dapat Mengganggu Kepercayaan Publik**

Klarifikasi berhubungan dengan bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dikomunikasikan. Menurut Edelman, Klarifikasi menentukan atau mempengaruhi emosi khalayak ketika memandang atau melihat suatu peristiwa. Membangun kepercayaan masyarakat yang berhubungan dengan kepuasan layanan oleh suatu instansi dapat diuji dengan Standar Operational Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan (Aldri Frinaldi, 2015).

Dari hasil temuan peneliti terungkap bahwa upaya BPK RI Perwakilan Sumbar dalam menanggapi berita negatif yaitu dengan formal dengan melakukan siaran pers, dan personal dengan melakukan *coffee morning* dengan mengobrol santai dengan wartawan, dan jika secara formal dan personal tidak bisa maka akan dilakukan hak jawab yang semuanya berpedoman dan mengacu pada Standar Operational Prosedur (SOP) dalam

manajemen isu dengan melakukan klarifikasi dan tanggapan berita pada Badan Pemeriksa Keuangan.

### **Hambatan-hambatan Berkomunikasi BPK RI Perwakilan Sumatera Barat dalam Penanganan Informasi**

Setelah dilakukan penelitian terungkap bahwa hambatan komunikasi BPK RI Perwakilan Sumbar dalam penanganan informasi yaitu faktor perbedaan pengetahuan tentang topik yang disampaikan, faktor pemilihan kata, faktor perbedaan persepsi, perbedaan level pengirim dan penerima pesan. Semua itu merupakan faktor penghambat komunikasi BPK RI Perwakilan Sumbar dalam penanganan informasi.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Singbad dan Bell (dalam Pratminingsih 2006:8) yang mana hambatan komunikasi meliputi perbedaan persepsi, perbedaan kepentingan, perbedaan pengetahuan dengan topik yang dikomunikasikan, keterlibatan emosi, kurangnya intropeksi, kesalahan dalam menilai penampilan, pesan yang disampaikan kurang jelas, kesalahan pemilihan kata, kurangnya perbedaan kosa kata, kesalahan penulisan dan pengucapan, serta perbedaan level antara pengirim penerima pesan.

### **Upaya Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Barat dalam Membangun Kepercayaan Publik**

Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam membangun kepercayaan dari publik yaitu dengan menjaga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berkualitas, tepat waktu dan cepat sesuai Standar Operational Prosedur (SOP) yaitu 60 hari kerja. *Trust* atau kepercayaan terbangun karena transparan, dan upaya transparan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat adalah dengan *Website* dan Pusat Informasi Komunikasi (PIK) yang mana mereka terbuka mengenai semua informasi sehingga kepercayaan dari publik muncul. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan mendekati diri kepada masyarakat, dengan *coffee morning* bersama wartawan, dengan *website* memberikan informasi-informasi kemasyarakatan bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan bekerja, dengan Badan Pemeriksa Keuangan mendengar bersama legislatif, *sharing seassion* bersama orang yang berkaitan langsung dengan Badan Pemeriksa Keuangan, dan dengan sahabat BPK, *Goes to campus*, serta perpustakaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumbar akan menjadi pusat research bersama mahasiswa, serta yang sedang direncanakan yaitu mengisi kegiatan pada acara *Car Free Day* untuk mendekati diri kepada masyarakat dengan rencana BPK akan menargetkan anak-anak usia dini dengan BPK buat dengan komunitas bermain dan edukasi bagi anak-anak sehingga kami berencana membuat sahabat BPK junior untuk lebih mendekati diri kepada masyarakat dan mendapatkan kepercayaan publik, yang mana kepercayaan publik itu perlu bagi instansi.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hamudy (2010) yang menyatakan bahwa kepercayaan publik merupakan unsur yang sangat penting dan mendasar untuk menjalankan administrasi publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani masyarakat. Tanpa kepercayaan publik, banyak kebijakan yang memiliki masalah yang serius. Oleh karena itu, perlu untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik.

## SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Sumbar dalam membangun kepercayaan publik dengan penanganan informasi pada media elektronik dengan mengacu pada 7 indikator penanganan informasi sudah terlaksana.
2. Upaya Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumbar dalam penanganan informasi terkait menanggapi berita negatif yang muncul di media elektronik yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap BPK RI Sumbar yaitu dengan formal dengan melakukan siaran pers, dan personal dengan melakukan *coffee morning* dengan mengobrol santai dengan wartawan, dan jika secara formal dan personal tidak bisa maka akan dilakukan hak jawab yang semuanya berpedoman dan mengacu pada Standar Operational Prosedur (SOP) dalam manajemen isu dengan melakukan klarifikasi dan tanggapan berita pada BPK.
3. Hambatan - hambatan berkomunikasi oleh BPK RI Perwakilan Sumbar dalam penanganan informasi terhadap berita yang muncul pada media elektronik yaitu faktor perbedaan pengetahuan tentang topik yang disampaikan, faktor pemilihan kata, faktor perbedaan persepsi, perbedaan level pengirim dan penerima pesan. Semua itu merupakan faktor penghambat komunikasi BPK RI Perwakilan Sumbar dalam penanganan informasi.
4. Cara BPK RI Perwakilan Sumbar dalam membangun kepercayaan dari publik adalah dengan menjaga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berkualitas, tepat waktu dan cepat sesuai Standar Operational Prosedur (SOP) yaitu 60 hari kerja. *Trust* atau kepercayaan terbangun karena transparan, dan upaya untuk transparan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat adalah dengan *Website* dan Pusat Informasi Komunikasi (PIK) yang sifatnya terbuka mengenai semua informasi sehingga kepercayaan dari publik muncul. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan mendekati diri kepada masyarakat, dengan *coffee morning* bersama wartawan, dengan *website* memberikan informasi - informasi kepada masyarakat bagaimana BPK bekerja, dengan BPK mendengar bersama legislatif, *sharing seation* bersama orang yang berkaitan langsung dengan BPK, dan dengan sahabat BPK, *Goes to campus*, serta perpustakaan BPK RI Perwakilan Sumbar akan menjadi pusat *research* bersama mahasiswa, serta yang sedang direncanakan yaitu mengisi kegiatan pada acara *Car Free Day* untuk mendekati diri kepada masyarakat dengan rencana BPK akan menargetkan anak-anak usia dini dengan BPK buat dengan komunitas bermain dan edukasi bagi anak-anak sehingga kami berencana membuat sahabat BPK junior untuk lebih mendekati diri kepada masyarakat dan mendapatkan kepercayaan publik, yang mana kepercayaan publik itu perlu bagi instansi.

## DAFTAR RUJUKAN

- A.Rusdiana dan Moch Irfan. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pusta Setia.
- Agus Mustaqim. 2017. *Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang*. Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Ais Zakiyudin. 2011. *Sistem Informasi Manajemen*. Penerbit Mitra Wacana Media.

- Aldri Frinaldi, dkk. 2015. *Influence of Public Service Quality in Citizen Satisfaction (Study in Private Hospital Y in Padang, West Sumatra Province)* Vol.6, No 1 February 2015.
- Aldri Frinaldi, dkk. 2019. *Policy Management to Develop Tourism Work Culture Consciousness and Increasing Visiting People's Satisfaction* Vol.10 No 1 February 2019.
- Aldri Frinaldi. 2017. *The Influence of Work Culture on Work Performance of Employees in Department of Transportation, Communication and Informatics of West Sumatera* Vol. 7, No.2 Desember 2017.
- Devi Novitasari dan Rony Ika Setiawan. 2015. *Pengaruh Komunikasi Internal, Pelatihan Kerja dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV Tirto Agung Lodojo*. Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Vol. 2, No.1, 2015.
- Fauzi Eka Putra. 2017. *Kegiatan Layanan dalam Penelusuran Informasi di Perpustakaan*. Jurnal Iqra Volume 11, No.1, Mei 2017.
- Heksawan Rahmadi dan Deni Malik. 2016. *Pengaruh Kepercayaan dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Pembelian E-Commerce Pada Tokopedia.com di Jakarta Pusat*. Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Volume 3, No.1, Maret 2016.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2003. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Media Suchaya. 2013. *Teknologi Komunikasi dan Media*. Jurnal Komunikasi Volume 2, No 1, Jan-April 2013.
- Meliana Sutanto dan Roy Setiawan. 2018. *Pengaruh Perceived Organizational Support (POS) Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Dengan Organizational Trust Sebagai Variabel Intervening di Hypermart Royal Plaza Surabaya*. Jurnal Agora Vol. 6, No.1 (2018). Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra.
- Richardus Eko Indrajit. 2006. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta : Andi.
- Sondang P. Siagian. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2009. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.